

## PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP N 3 SUKAWATI DALAM PROGRAM RKAS

Ni Luh Tina Yanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

*e-mail* : tinayanti24@gmail.com

### ABSTRACT

*The application of accountability and transparency in the management of BOS funds at SMP N 3 Sukawati in the RKAS program. One form of education funding comes from the government, namely the School Operational Assistance (BOS) fund. BOS funds require transparent and accountable management.*

*This research aims to identify and understand the application of accountability and transparency in the management of BOS funds at SMP N 3 Sukawati in the RKAS program. This research uses a qualitative method with a comparative descriptive approach. This aims to assess the application of accountability and transparency in the management of BOS funds at SMP N 3 Sukawati in the RKAS program. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques.*

*The results of this study indicate that the application of accountability and transparency in the management of BOS funds in the RKAS program at SMP N 3 Sukawati is interrelated and has been going well. The implementation of accountability has gone well. Reporting on BOS funds is intended not only for the party providing the budget, but also for channeling it to the party receiving the budget. The implementation of transparency at the planning stage is quite good and can encourage increased accountability. It can be seen that information disclosure and community involvement in SMP N 3 Sukawati are well implemented. The use of funds is according to the needs of students and is guided by national education standards. One application of the principle of transparency is that the community is involved in the process of managing school funds, especially BOS funds.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, BOS Fund, RKAS.*

### PENDAHULUAN

Kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, dimana prinsip dari pendidikan itu sendiri adalah memanusiakan manusia, mengubah perilaku dan mendewasakannya. Didalam undang-undang, pendidikan sudah diatur untuk meningkatkan hidup warga negara. Oleh karenanya, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban memberi pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan menjadi acuan dalam *mengupgrade* daya saing dengan negara-negara lainnya. (Laila,2018). UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Sebagaimana UUD 1945 pasal 31, pendidikan menjadi hak bagi seluruh rakyat. Disamping itu, pendidikan juga harus bermutu dan berdaya saing agar dapat mencetak generasi emas. Namun demikian, hal tersebut tidak akan terwujud kecuali adanya peran pemerintah dalam menyalurkan dana sebagai pembiayaan pendidikan. Sebagaimana diungkap oleh Ekowati bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan komponen masukan instrumental, yang berupa pembiayaan pendidikan (Ekowati, 2016).

Salah satu pendanaan APBN dalam pembiayaan sekolah adalah BOS Bantuan Operasional Sekolah, dimana tujuan dari BOS ini adalah meringankan beban masyarakat untuk memperoleh pendidikan selama sembilan tahun. Munurt Mulyono, dalam pelaksanaan, penyaluran, serta pengelolaan dana BOS harus mengikuti Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dari Kemendikbud dan Kemenag yang melaksanakan dan mengelola dana BOS (Mulyono, 2015).

Namun demikian, meskipun ada dana BOS untuk mengatasi permasalahan pendidikan, permasalahan selalu muncul dimulai dari adanya penyaluran yang tidak sesuai kebutuhan lembaga, ketidakefektifan dan BOS, kurangnya keterlibatan orang tua dalam perencanaan kegiatan, dan pengelolaan anggaran hingga laporan, pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaannya, yang seringkali terdapat perubahan terkait aplikasi program dana BOS dari Tim BOS pusat. Pada pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan, seperti penyusunan anggarannya, penggunaannya hingga laporan pertanggung jawaban. Disamping itu, sekolah cenderung tidak mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ialah langkah awal yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan, dimana pelaksanaannya didasarkan pada keterlaksanaan akuntansi akuntansi serta evaluasi secara akuntabel, demokratis serta transparan. Menurut Annisa Melliana (2016), RKAS merupakan dokumen resmi anggaran sekolah dimana telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan pengesahan dinas pendidikan yang bersangkutan atau pengelola yayasan bagi lembaga swasta. Isi RKAS berupa sumber pendapatan dalam anggaran satu tahun. Susunan RKAS berisi tentang pengelolaan dana BOS (baik dari pemerintah nasional maupun pemerintah daerah), dimana Kepala sekolah membentuk tim manajemen dana BOS. Tim ini disertai Kepala Sekolah merancang RKAS dengan menganalisis kebutuhan sekolah, setelah itu, baru melibatkan guru, komite sekolah dalam merencanakan program yang tepat. Seluruh anggota sekolah kecuali siswa Di SMP N 3 Sukawati dalam pengelolaan dana BOS bertanggung jawab dalam melaksanakan RKAS.

Penerimaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dikelola secara Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang artinya sekolah mengelola dana BOS secara mandiri. Peraturan pengelolaan dana bos tercantum dalam Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Sukawati Nomor: 422/022/SMPN.3/SKW/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen BOS APBN Tahun 2019 SMP Negeri 3 Sukawati. Permasalahan yang masih dihadapi di SMP N 3 Sukawati adalah kurangnya komunikasi antara anggota komite sekolah terhadap orang tua siswa atau wali sehingga orang tua siswa masih mempertanyakan apakah anaknya yang bersekolah di SMP N 3 sukawati sudah mendapatkan dana BOS dikarenakan orang tua siswa masih membayar sarana pembelajaran salah satunya pembelian Buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Jadi, perlunya keterbukaan informasi terhadap masyarakat mengenai Dana BOS sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

Keterbukaan informasi merupakan faktor kunci dalam prinsip akuntabilitas serta transparansi. Perlu pengelolaan serta pertanggung jawaban yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan serta pertanggungjawaban laporan keuangan supaya bisa diterima dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS ddalam RKAS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ada pada sekolah tersebut. Melihat pentingnya peran akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS pada program RKAS di SMP N 3 Sukawati, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional**

## **Sekolah (BOS) di SMP N 3 Sukawati dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)”.**

Berdasarkan paparan diatas, rumusan masalah pada riset ini ialah Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP N 3 Sukawati dalam program rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)?

Tujuannya riset ini yaitu mengetahui dan memahami penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam program RKAS.

Manfaat riset ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam program RKAS. Dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada sekolah khususnya bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS sebagai pertimbangan bagaimana pengelolaan dana BOS yang baik, benar, transparan, serta akuntabel sesuai petunjuk teknis pemerintah.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintah mempunyai peranan dalam mengelola keuangan publik, yang meliputi keuangan pusat, daerah, maupun desa. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut PP No. 24 Tahun 2005 paraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Tujuan penerapan SAP yaitu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang intinya adalah *pertama*, SAP merupakan standar akuntansi keuangan yang disahkan oleh pemerintah, *kedua* melaporkan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, *ketiga* memberi wewenang untuk mengawasi pendanaan secara fungsional, dan *keempat* menganalisis informasi yang disediakan pemerintah

#### **Akuntabilitas**

Dalam Bahasa Inggris, kata Akuntabilitas berarti “*accountability*” yang mempunyai arti pertanggung jawaban, suatu keadaan atau yang diminta pertanggung jawabnya dari berbagai elemen baik atasan maupun bawahan dari suatu institusi sesuai tugas atau wewenangnya masing-masing.

Akuntabilitas (menurut Weny Ultafiah, 2017) ialah kewajiban dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, serta pengungkapan segala aktivitas kegiatan sumber daya publik kepada pihak yang memberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas ialah memberi informasi atas kegiatan serta kinerja pemerintahan pada para pihak berkepentingan (Mahmudu, 2015:9).

Beberapa indikator dari peneliti sebelumnya yaitu dari Umi Nur Lailia (2018), sebagai berikut:

1. Keterlibatan komite sekolah dan semua pihak dalam pembuatan RKAS sesuai visi dan misi sekolah.
2. Setiap kegiatan selalu membentuk kepanitian dan dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana BOS.
3. Sekolah membuat laporan keuangan.

### **Transparansi**

Transparansi menurut Mahmudi (2015:22) adalah keterbukaan dalam pelayanan publik yang bisa diakses oleh semua pihak serta disediakan dengan baik dan mudah dipahami. Transparansi bisa diakses oleh para pihak yang berkepentingan serta informasinya bisa dimengerti serta dipantau.

Berikut ini indikator dari peneliti sebelumnya yaitu dari Umi Nur Lailia (2018): “1) ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, 2) adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3) adanya audit yang independen dan efektif”.

### **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Salah satu yang menentukan ketercapaian tujuan adalah bagaimana kegiatan itu dilakukan yaitu dengan pengelolaan atau manajemen (Maknum, 2019). Program BOS ialah program pemerintah untuk menjamin pendidikan yang bisa diakses oleh semua elemen masyarakat melalui program wajib belajar sembilan tahun.

Menurut Nasution, secara konsep, BOS digunakan untuk pembiayaan oprasional dan non-operasional, namun demikian dikarenakan biaya satuan menggunakan pembiayaan rata-rata nasional, dana BOS boleh digunakan untuk pembiayaan personil dan Investasi (Nasution, 2017). Tujuan BOS yaitu membantu dalam membiayai pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan selama sembilan tahun .

Dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan, “biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain”.

Menurut Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Sukawati Nomor: 422/002/SMPN.3/SKW/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen BOS APBN Tahun 2020 SMP Negeri 3 Sukawati, tim pelaksana manajemen BOS APBN adalah mengupdate data pokok pendidikan, menyusun RKAS yang menyangkut seluruh penerima, melapor perubahan jumlah siswa, memverifikasi jumlah penerimaan dana dengan jumlah murid, melakukan pengelolaan dana BOS dengan transparan serta bertanggungjawab, mengumumkan di papan pengumuman penerimaan dana dan penggunaan dana BOS, bertanggungjawab baik formal maupun materil terhadap pengelolaan dana BOS disekolah, melaporkan pertanggungjawaban dana BOS.

### **Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)**

Menurut Annisa Melliana (2016), RKAS adalah dokumen resmi anggaran sekolah, dimana telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan pengesahan dari dinas atau pengelola yayasan bagi swasta. Pemberlakuan RKAS disusun selama satu tahun yang meliputi pendapatan dan pengeluaran dana, yang mencakup pengeluaran berbentuk uang yang diterima dan dikelola. RKAS disini ditunjuk supaya sekolah mempunyai perencanaan yang tepat sehingga anggaran telah teralokasikan dengan pembelajaran sesuai kebutuhan sekolah.

Setiap RKAS disusun, harapannya bisa tercipta pelaksanaan program sekolah secara efisien serta efektif sesuai anggaran yang sudah direncanakan untuk tercapainya tujuan sekolah. RKAS memuat komponen-komponen, yakni sumber dana, uraian kegiatan, jumlah biaya satuan, jumlah biaya total, program sekolah, dan lainnya. Adanya RKAS tidak cuma tujuan yang tercapai, akan tetapi bagaimana pengendalian serta pengawasan penggunaan sumber daya yang ada.

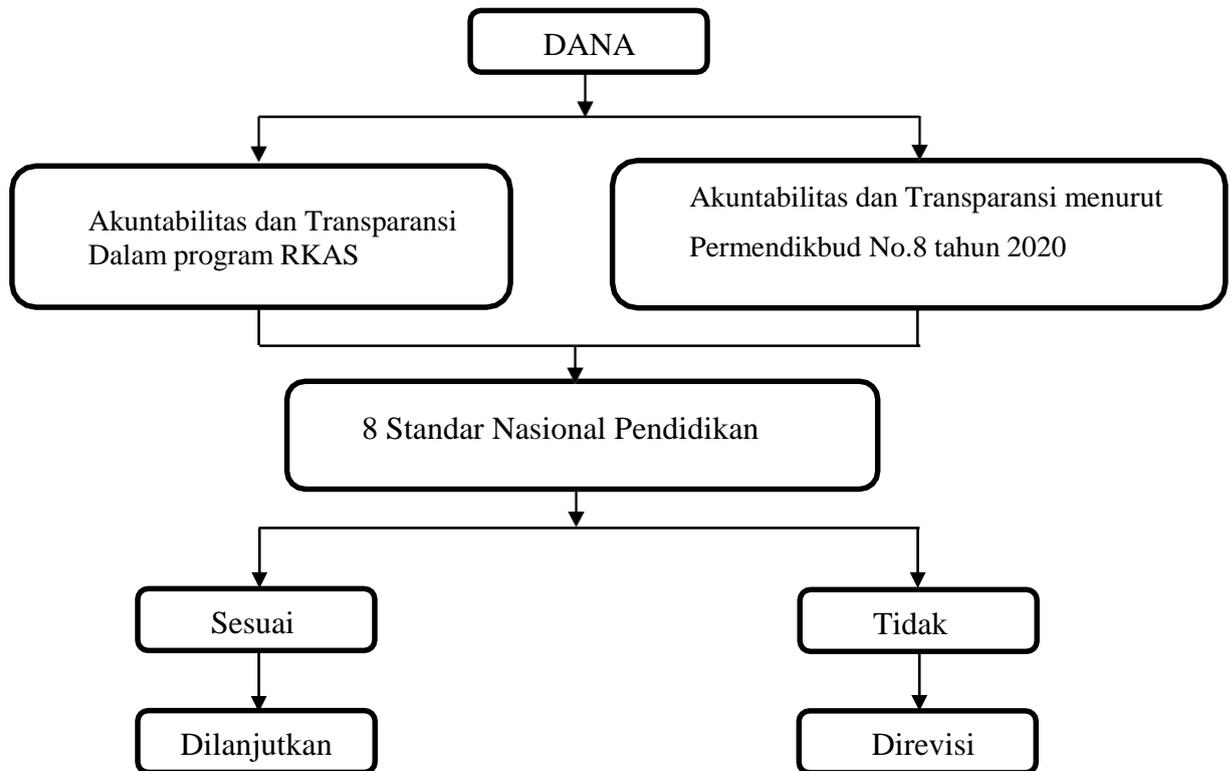
### **METODE PENELITIAN**

Pada riset ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Metode penelitian yang dipakai peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif untuk menilai penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam program RKAS yaitu dengan cara membandingkan peraturan pemerintah dengan pelaksanaan penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di sekolah. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam RKAS dan membandingkannya dengan peraturan pemerintah terkait. Dari penelitian ini akan mendapatkan hasil tentang penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam program RKAS apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan

pemerintah terkait. Jika hasil penelitian sesuai maka perlu diadakannya revisi terhadap penerapan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS dalam program RKAS yang diterapkan di SMP N 3 Sukawati. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan desain penelitian pada gambar berikut ini:

Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 3 Sukawati Dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)



**Gambar 3.1** Kerangka Berpikir

Untuk pembatasan lingkungan riset, perlu ditentukan definisi variabel mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS dalam RKAS, yakni:

1. Akuntabilitas

1) Perencanaan

Seluruh aktivitas yang didanai oleh dana BOS direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara terbuka.

2) Pelaksanaan

Pengelolaan keuangan dana BOS ialah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

3) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan secara administratif, teknis, serta hukum. Hal ini dilakukan untuk dikembangkan secara terus menerus dan memelihara partisipasi masyarakat.

## 2. Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara jujur, sehingga mereka dapat mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik tentang kinerja pemerintah serta pengelolaan sumber dana yang sesuai dengan undang-undang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada riset ini, teknik analisis data model Milles dan Huberman digunakan yang meliputi mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Di SMP N 3 Sukawati dalam Program RKAS**

Pemerintah memberikan bantuan dana BOS untuk sekolah sebagai penunjang terlaksananya pendidikan. Oleh karenanya, sekolah berkewajiban mengelola dana BOS dengan sebaik mungkin, dimana pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini bisa diwujudkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan BOS di SMP N 3 Sukawati dimulai melaksanakan penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Sekolah ini membuat perencanaan dengan didasarkan pada analisis kebutuhan selama satu tahun. Dalam menyusun RKAS ini, semua elemen lembaga berkontribusi guna tercapainya tujuan dari dana BOS. Misalnya, beberapa guru diberi tugas untuk mengkoordinir koordinator struktural dna BOS seperti koordinator keuangan, siswa, sarana dn prasaran dn lainnya. Koordinator ini kemudian akan mengkaji dan mengemukakan apa yang dibutuhkan dan yang diprioritaskan sekolah, sehingga apa yang dibutuhkan bisa dibeli atau diperbaiki. Oleh karena itu, pengelolaan dna bos dilakukan dengan melibatkan elemen sekolah sebagai penggerak pendidikan.

Dalam menyusun RKAS, seluruh komponen SMP N 3 Sukawati dilibatkan untuk menyusun program apa saja yang akan dilaksanakan dalam RKAS selama satu tahun, sehingga melalui penyusunan tersebut dapat diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, SMP N 3 Sukawati memperhatikan tidak hanya kebuthan lembaga namun juga seberapa besar pendapatan dan pengeluaran dana BOS, sehingga pengelolaan dana BOS dpat berlangsung secara maksimal. Selain itu, peranan kepala sekolah, komite sekolah dn bendahara tidak kalah penting perannya dengan koordinator guru. Karena kebijakan pengeluaran dana BOS harus disetujui oleh kepala sekolah. Sebagaimana pandangan Laila (2018) bahwa kepala sekolah bertanggungjawab pada

segala hal yang berkaitan dengan dana BOS, sehingga mekanisme pengelolaan tersebut dari perencanaan sampai pelaporan harus diketahui kepala sekolah.

Menurut hasil penelitian, menunjukkan penerapan akuntabilitas di SMP N 3 Sukawati sudah berjalan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaporan dana BOS sudah disampaikan kepada pihak yang terkait yaitu pemerintah sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima dana BOS. Menerapkan cara *offline* serta *online* dalam pelaporan dana BOS. Pelaporan yang dilaksanakan secara *offline* yaitu ditunjukkan dengan sekolah bertanggung jawab menyampaikan data hasil pengelolaan dana BOS pada masyarakat. Pelaporan *offline* dilaksanakan saat ada kegiatan bersama masyarakat dan kegiatan yang memiliki anggaran besar. Sedangkan pelaporan *online* berkolaborasi dengan komite sekolah sebagai perantara data kepada masyarakat. Informasi tersebut diberikan kepada wali murid dengan disebar via *whatsapp*

Dari paparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas di SMP N 3 Sukawati telah berjalan baik. Pelaporan tidak hanya dilaporkan kepada pemberi dana BOS tapi juga penerima dana tersebut.

### **Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam program RKAS**

Pelaksanaan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS yakni saat tahap penyusunan pengelolaan dana BOS, yang sesuai dengan Permendikbud No. 8 tahun 2020 yang membahas tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dimana transparansi adalah keterbukaan pengelolaan dana BOS dan mengkoordinasikan semua aspirasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Hal tersebut tujuannya agar tiap pengelolaan yang dengan menggunakan dana BOS yang dilaksanakan sekolah bisa berjalan secara terbuka dalam menerima tiap aspirasi serta saran dari masyarakat.

Transparansi di SMP N 3 Sukawati dimulai saat menyusun dana BOS, dimana jumlah yang diterima sesuai dengan siswa yang terdaftar. Dalam menerapkan transparansi dana BOS, dilakukan dengan mempersiapkan data kebutuhan operasional sekolah dalam satu tahun, yang meliputi penggajian guru tidak tetap, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana, dan yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu Anggraini (2013), bahwa perencanaan biaya pendidikan berasal dari sumber pendapatan yang kemudian digunakan dari program yang disusun dengan merinci pembiayaan dalam satu tahun anggaran

Transparansi yang dilakukan di SMP N 3 Sukawati, bertujuan untuk memberitahu masyarakat terkait pengelolaan pendidikan yang dibutuhkan sekolah. Salah satu perencanaan

sekolah yang penting adalah RKAS. Sebagaimana yang diungkap oleh Laila (2018) perencanaan anggaran kegiatan dipergunakan untuk program atau kegiatan yang terkait dengan peserta didik dan operasionalnya. RKAS SMP N 3 Sukawati, dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2.1** Bentuk Ringkasan Keseluruhan RKAS

No.	Kegiatan / Program	Nilai RKAS
1	Standar kompetensi lulusan	114.997.000
2	Standar isi	428.078.000
3	Standar proses	157.497.000
4	Standar pendidik dan tenaga kependidikan	147.060.000
5	Standar sarana dan prasarana	382.900.000
6	Standar pengelolaan	58.379.000
7	Standar pembiayaan	135.451.000
8	Standar penilaian	135.338.000

(Sumber Laporan RKAS tahun 2020)

Ringkasan diatas menunjukkan bahwa dana BOS telah mencakup semua standar nasional pendidikan. Dana BOS dicairkan dalam 3 tahap dalam satu tahun yang kemudian dicairkan setiap periode triwulan. Sebagaimana tabel berikut akan menjelaskan penggunaan dana BOS triwulan ke IV tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 4.2.2** Penggunaan Dana BOS Triwulan ke IV tahun 2020

No.	Kegiatan / Program	Penggunaan Dana
1	Standar kompetensi lulusan	-
2	Standar isi	-
3	Standar proses	128.280.000
4	Standar pendidik dan tenaga kependidikan	7.395.000
5	Standar sarana dan prasarana	74.582.000
6	Standar pengelolaan	16.756.000
7	Standar pembiayaan	30.188.000
8	Standar penilaian	34.739.000
Total Pengeluaran Dana BOS		291.940.000

(Sumber Laporan RKAS Pertriwulan tahun 2020)

Penggunaan BOS SMP N Sukawati pada periode triwulan IV sudah berstandar nasional, dimana sudah menyesuaikan kebutuhan mendesak seperti pembiayaan pengelolaan sekolah seperti

standar pendidik dan kependidikan. Standar proses digunakan untuk menyediakan buku induk. Standar kompetensi lulusan digunakan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Standar sarana dan prasarana digunakan untuk meningkatkan fasilitas, seperti multimedia dan media pembelajaran. Standar penilaian digunakan untuk menilai peserta didik seperti ujian semester dan lainnya.

Dengan didasarkan paparan diatas, transparansi perencanaan sudah baik, dimana SMP N 3 Sukmawati melibatkan masyarakat dan memaparkan RKAS secara terbuka. Dana yang diterima dari BOS digunakan untuk menyediakan kebutuhan selama proses pendidikan dalam satu tahun. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan keterbukaan di SMP N 3 Sukmawati merupakan prinsip dari transparansi.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas merepresentasikan bahwa pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SMP N 3 Sukawati saling berkaitan dan sudah berjalan dengan baik. Penerapan akuntabilitas yang terjadi di SMP N 3 Sukawati sudah baik. Hal ini karena pelaporan dana BOS tidak hanya ditujukan kepada pemberi dana, akan tetapi yang menerima dana juga diinformasikan. Transparansi pada tahap perencanaan sudah mengikuti prinsip akuntabilitas, karena SMP N 3 Sukawati memberi informasi secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Disamping itu, dana digunakan sesuai kebutuhan peserta didik dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan merupakan prinsip transparansi.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengelola dana BOS sebaiknya selalu melakukan monitoring terhadap penggunaan dana BOS, serta memantau proses transparansi dan akuntabilitas sehingga menjadikan pengelolaan dana BOS berkualitas dan sekolah lebih bermutu.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti pada ruang lingkup yang lebih luas seperti pengelolaan dana BOS di tingkat SMA yang juga menerapkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperoleh perbandingan yang lebih banyak dengan situasi yang berbeda dan hasil yang lebih baik.

### **Daftar Pustaka**

D. F. Arifiyanto dan T Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Jurusan Akuntansi dan Keuangan. Vol 2 No.3 Tahun 2014.

D Nordiawan. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ella Febya Andani dan Syunu Trihantoyo. 2020. *Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya*. Jurnal Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.
- Ida Bagus Made Sutra Isvara Permas, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Made Aristia Prayudi. 2017. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Sekolah Negeri Bengkulu yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi)*. Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1, Vol VIII No.2 Tahun 2017.
- Imam Ghazali.2001. *Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jamal Ma'mur Asmani. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI)
- Krisna Liona Lalolo P.2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maya Kusuma Nasution. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*. Dalam Jurnal Perspektif Pendidikan dan Keguruan, Vol VIII, No. 1, April 2017.
- Mujiono. 2017. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis, Volume VI No.2 Oktober 2017.
- Nafisatil Maknun. 2019. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus Di SD Negeri Tambakan Bangil)*. Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, Surabaya.
- N Darise. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nico Adrianto. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Ristya Dwi Anggraini. 2013. *Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

- Santi Ekowati. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan*.
- Slamet Suyanto. 2005. *Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Sri Minarti. 2011. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfia F, Andi Samsu Alam dan Andi Lukman Irwan. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai*. Dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan, Volume III, No.2, Juli 2010.
- Tutus Juliantika, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014*. Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2007, Volume IV (1):1-5.
- Umi Nur Lailia. 2018. *Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang*.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, H dan Purnomo, S. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.